



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1227, 2022

KEMEN-KUKM. Klasifikasi Arsip. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tertib arsip dan peningkatan pengelolaan arsip dinamis secara efektif dan efisien, perlu dilakukan pemberkasan dan penataan arsip dengan mengelompokkan arsip dalam satu kesatuan informasi yang utuh berdasarkan klasifikasi arsip;

b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya sistem pengelolaan Arsip Dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai dengan penyusutan Arsip.

Pasal 3

Pimpinan Pencipta Arsip bertanggung jawab menetapkan Klasifikasi Arsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan Klasifikasi Arsip.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan fungsi yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Klasifikasi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok Kementerian.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Klasifikasi Arsip yang berkaitan dengan tugas pokok Kementerian, yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Skema Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang terdiri atas:
 - a. fungsi sebagai pokok masalah (primer);
 - b. kegiatan sebagai sub masalah (sekunder); dan
 - c. transaksi sebagai sub-sub masalah (tersier).
- (2) Skema Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Kode Klasifikasi Arsip Kementerian disusun dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan fungsi dan tugas Unit Pengolah serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.

Pasal 7

Klasifikasi Arsip Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Klasifikasi Arsip di

Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 475), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2022

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

FUNGSI FASILITATIF

HM. HUBUNGAN MASYARAKAT

- HM.00 Pemberitaan/Publikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peliputan dan analisis pemberitaan dan publikasi terkait kegiatan seluruh unit organisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan kegiatan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- HM.01 Dengar Pendapat (*Hearing*)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat dengar pendapat bersama DPR, DPD, DPRD, dsb.
- HM.02 Hubungan Media dan Antar Lembaga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis media dan koordinasi hubungan komunikasi dan kerja sama terkait hubungan masyarakat dengan seluruh unit organisasi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- HM.03 Dokumentasi dan Penerbitan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.

HK. HUKUM

- HK.00 Program Legislasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun program legislasi nasional.
- HK.01 Produk Hukum
HK.01.00 Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, instruksi, prosedur tetap atau prosedur operasional standar.
- HK.01.01 Produk Hukum yang Bersifat Penetapan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan

- kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan.
- HK.02 Perjanjian Kerjasama
- HK.02.00 Kerjasama Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.
- HK.02.01 Kerjasama Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.
- HK.03 Bantuan Hukum
- HK.03.00 Bantuan Hukum Kasus Perdata
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang koperasi dan UKM.
- HK.03.01 Bantuan Hukum Kasus Pidana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang koperasi dan UKM.
- HK.03.02 Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum Tata Usaha Negara di bidang koperasi dan UKM.
- HK.04 Telaah Hukum
- HK.04.00 Telaah Hukum Internal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk internal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .
- HK.04.01 Telaah Hukum Eksternal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk eksternal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .
- HK.05 Sosialisasi Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.
- HK.06 Dokumentasi Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, perluasan, dan penyebaran informasi hukum.
- HK.07 Hak Atas Kekayaan Intelektual
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- HK.08 Kasus Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus hukum

baik hukum pidana, perdata, dan peradilan tata usaha, arbitrase dan hak atas kekayaan intelektual oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .

IP. INFORMASI PUBLIK

- IP.00 Pelayanan Informasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koordinasi dan pengelolaan pelayanan informasi.
- IP.01 Pelayanan Pengaduan Internal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan pengaduan terkait kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- IP.02 Kepustakaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan literasi dan pengelolaan perpustakaan.
- IP.03 Aspirasi Masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat.

KP. KEPEGAWAIAN

- KP.00 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
 - KP.00.00 Perencanaan Formasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan calon pegawai, mulai dari pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, termasuk persediaan pegawai (*bezzeting*), usulan dari unit kerja dan rencana penempatan pegawai sampai dengan penetapan klasifikasi pendidikan.
 - KP.00.01 Usulan Formasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan permintaan formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN.
 - KP.00.02 Persetujuan/Penetapan Formasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan persetujuan/penetapan formasi.
 - KP.00.03 Penetapan Formasi Khusus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi khusus termasuk usulan formasi khusus.
- KP.01 Pengumuman dan Seleksi Pengadaan ASN
 - KP.01.00 Penerimaan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan pengumuman penerimaan.
 - KP.01.01 Penempatan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan ASN di unit-unit kerja
 - KP.01.02 Pengangkatan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan CASN, pengangkatan CASN menjadi ASN mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan
 - KP.01.03 Penerimaan CASN

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan CASN
	KP.01.04	Pembekalan/Orientasi CASN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembekalan/orientasi CASN
KP.02	Pangkat/Jabatan	
	KP.02.00	Ujian Penyesuaian Ijazah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS.
	KP.02.01	Ujian Dinas Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi PNS.
	KP.02.02	Ujian Kompetensi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan ujian kompetensi (<i>assesment test</i>) untuk kenaikan pangkat/jabatan dan/atau peningkatan kompetensi.
	KP.02.03	Kenaikan Pangkat/golongan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kenaikan pangkat/golongan bagi PNS.
	KP.02.04	Kelas Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan Kelas Jabatan.
	KP.02.05	Pengangkatan Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional termasuk di dalamnya pelantikan.
	KP.02.06	Pemberhentian Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural maupun fungsional.
	KP.02.07	Usulan Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan jabatan fungsional tertentu mulai dari usulan jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pelaksana dan fungsional.
	KP.02.08	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu.
	KP.02.09	Peninjauan Masa Kerja Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan peninjauan/penyesuaian masa kerja.
KP.03	Pengembangan Karier	
	KP.03.00	Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan pegawai.
	KP.03.01	Kenaikan Gaji Berkala Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala pegawai.
	KP.03.02	Peninjauan Masa Kerja Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan

		peninjauan/penyesuaian masa kerja.
KP.03.03	Penyesuaian Tunjangan Keluarga	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.
KP.03.04	Promosi Pegawai	Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan.
KP.03.05	Rotasi Kerja Pegawai	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas.
KP.03.06	Alih Tugas Pegawai	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, pegawai yang diperbantukan.
KP.03.07	Baperjakat	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Baperjakat.
KP.04	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan	
KP.04.00	Pengangkatan Jabatan	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional termasuk di dalamnya pelantikan.
KP.04.01	Pemberhentian Jabatan	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural maupun fungsional.
KP.05	Pendelegasian Wewenang	
KP.05.00	Pelaksana Tugas (Plt.)	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.
KP.05.01	Pelaksana Harian (Plh.)	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).
KP.06	Pengembangan Pegawai	
KP.06.00	Perencanaan dan Pengembangan Karir	Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan karir pegawai seperti penyusunan, pemetaan, pembinaan, dan pengembangan pola karir pegawai.
KP.06.01	Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Naskah-naskah yang berkaitan dengan tugas belajar dan ijin belajar.
KP.06.02	Keterampilan/Keahlian	Naskah-naskah yang berkaitan dengan keterampilan/keahlian pegawai seperti penyusunan, dan pengembangan pola

		keterampilan/keahlian pegawai.
KP.06.03	Sertifikasi Profesi	Naskah-naskah yang berkaitan dengan sertifikasi profesi keterampilan/ keahlian tertentu.
KP.07	Administrasi Pegawai	
KP.07.00	Data/Keterangan Pegawai	Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.
KP.07.01	Kartu-Kartu Kepegawaian	Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu-kartu kepegawaian seperti Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri/Suami, dan Kartu Jaminan Kesehatan.
KP.07.02	Tanda Jasa	Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
KP.07.03	Penghargaan	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan karena prestasi yang didapat, sebagai pegawai teladan, penghargaan tewas dalam tugas.
KP.07.04	Tenaga Kontrak	Naskah-naskah yang berkaitan dengan tenaga kontrak.
KP.07.05	Praktek Kerja Lapangan (Magang)	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (Magang).
KP.07.06	Berkas Perseorangan	Naskah-naskah yang berkaitan dengan personal file pegawai.
KP.08	Pembinaan Pegawai	
KP.08.00	Disiplin Pegawai	Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pembinaan disiplin pegawai serta naskah-naskah pemberian hukuman disiplin pegawai yang meliputi teguran lisan/tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan/penurunan pangkat/golongan dan pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.
KP.08.01	SKP (Satuan Kinerja Pegawai)	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai.
KP.08.02	Pembentukan Karakter	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pembentukan karakter pegawai dalam segi jasmani dan rohani.
KP.08.03	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai.

	KP.08.04	Perselisihan/Sengketa Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa pegawai seperti perceraian.
KP.09	Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu	
	KP.09.00	Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan fungsional tertentu mulai dari usulan hingga pengangkatan.
	KP.09.01	Kenaikan Jenjang Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kenaikan pangkat, jenjang jabatan dan alih jabatan mulai dari usulan hingga kenaikan pangkat.
	KP.09.02	Pemindahan Jabatan Fungsional Tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan jabatan fungsional tertentu mulai dari usulan pemindahan hingga pemindahan jabatan fungsional tertentu.
	KP.09.03	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu.
	KP.09.04	Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu mulai dari usulan pemberhentian hingga pemberhentian jabatan fungsional tertentu.
KP.10	Kesejahteraan Pegawai	
	KP.10.00	Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan asuransi/jaminan kesehatan pegawai.
	KP.10.01	Perumahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan tabungan perumahan pegawai.
	KP.10.02	Rekreasi/Kesenian/Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian, dan olahraga.
	KP.10.03	Bantuan Sosial Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya.
KP.11	Pemberhentian Pegawai	
	KP.11.00	Pemberhentian Pegawai Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau

		bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pensiun termasuk didalamnya pensiun/duda/janda/anak dan Taspen.
	KP.11.01	Pemberhentian Pegawai Tidak Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya SK pemberhentian.
	KP.11.02	Pemberhentian Sementara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai sementara.
	KP.11.03	Batas Usia Pensiun Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai sesuai batas usia pensiun.
KP.12	Cuti Pegawai	
	KP.12.00	Cuti Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan cuti tahunan.
	KP.12.01	Cuti Besar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan cuti besar.
	KP.12.02	Cuti Sakit Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan cuti sakit.
	KP.12.03	Cuti Bersalin Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan cuti bersalin.
	KP.12.04	Cuti Karena Alasan Penting Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan cuti karena alasan penting.
	KP.12.05	Cuti di Luar Tanggungan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan cuti di luar tanggungan negara.
KP.13	Oganisasi Non Kedinasan	
	KP.13.00	KORPRI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
	KP.13.01	Dharma Wanita Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
	KP.13.02	Organisasi Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non-kedinasan lainnya.

PR. KEPROTOKOLAN

- PR.00 Acara Kedinasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan acara kedinasan termasuk pelantikan, peresmian, dan jamuan.
- PR.01 Kunjungan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari dan ke masyarakat.
- PR.02 Apresiasi Antar Lembaga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan apresiasi dan hubungan antar Lembaga, pemberian cenderamata, dll.
- PR.03 Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar nama/alamat kantor/pejabat.
- PR.04 Agenda Pimpinan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan.

RT. KERUMAHTANGGAAN

- RT.00 Pengelolaan Fasilitas Kantor
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan fasilitas kantor termasuk penggunaan ruang kerja, kendaraan dinas, dan telekomunikasi.
- RT.01 Ketertiban dan Keamanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketertiban dan keamanan termasuk pengamanan personil/lingkungan kantor, rumah dinas, izin keluar masuk orang atau barang, kehilangan/kecelakaan/gangguan, perparkiran, tanda pengenalan pegawai, pakaian dinas.
- RT.02 Pelayanan
- RT.02.00 Kesehatan/Poliklinik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di poliklinik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- RT.02.01 Tempat Penitipan Anak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tempat penitipan anak.
- RT.02.02 Layanan Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan layanan lainnya.

TU. KETATAUSAHAAN

- TU.00 Rapat Pimpinan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan termasuk bahan rapat, notulen rapat/hasil pembahasannya.
- TU.01 Perjalanan Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi perjalanan dinas Menteri/Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya dalam dan luar negeri, termasuk pengurusan visa (*exit*), Paspor (*permit*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

- TU.02 Tanda Kenang-kenangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda kenang-kenangan kepada organisasi dan/atau perorangan yang memiliki jasa dan prestasi.
- TU.03 Ucapan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, dan ucapan permohonan maaf.

AR. KEARSIPAN

- AR.00 Pembinaan Kearsipan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan, Pemberian Pedoman dan Standar Kearsipan, Pemberian Bimbingan, Supervisi, Fasilitasi, dan Konsultasi, Sosialisasi, Pengawasan, Diklat dan Pengembangan SDM Kearsipan, dan Akreditasi dan Sertifikasi.
- AR.01 Pengelolaan Arsip Dinamis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kearsipan dinamis meliputi pengelolaan Arsip Aktif, pengelolaan Arsip Inaktif, pengelolaan Arsip Vital, pengelolaan Arsip Terjaga, dan alih media Arsip.
- AR.02 Penyusutan Arsip
- AR.02.00 Pemindahan Arsip
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemindahan arsip dari Unit Pengolah kepada Unit Kearsipan
 - AR.02.01 Pemusnahan Arsip
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemusnahan arsip
 - AR.02.02 Penyerahan Arsip
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyerahan arsip dari Unit Kearsipan kepada Lembaga Kearsipan
- AR.03 Aplikasi Kearsipan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan aplikasi umum bidang kearsipan dan arsip elektronik.

KU. KEUANGAN

- KU.00 Pelaksanaan Anggaran
- KU.00.00 DIPA/POK
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), maupun revisi DIPA/ POK.
 - KU.00.01 TOR/RAB
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan TOR/RAB.
 - KU.00.02 Penggajian dan Pembayaran Tunjangan Kinerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan

		kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran berupa penggajian kepada pegawai dan pemberian tunjangan, termasuk daftar gaji pegawai dan tunjangan dan bukti pembayarannya.
KU.00.03	Pengeluaran Anggaran	Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, mulai dari SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang), SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan), SPP-TUP (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), juklak/mechanisme pengelolaan APBN serta Bahan Nota Keuangan.
KU.01	Pengelolaan Perbendaharaan	
KU.01.00	Perbendaharaan	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan.
KU.01.01	Verifikasi Anggaran	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggung jawaban penerimaan/pengeluaran anggaran.
KU.01.02	Pembukuan Anggaran	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu-kartu realisasi anggaran dan kartu pengawasan realisasi anggaran.
KU.01.03	Pajak	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).
KU.01.04	Penerimaan Non Pajak	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara.
KU.01.05	Pengembalian Belanja	Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian

		belanja pegawai, barang, modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
KU.01.06		SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran).
KU.01.07		Keterangan Penghasilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.
KU.02	Laporan Keuangan	
KU.02.00		Dokumen Sumber Akuntansi Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa LRA, neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Ekuitas, serta naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
KU.02.01		Berita Acara Rekonsiliasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Secara Elektronik.
KU.02.02		Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan laporan keuangan
KU.03	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri	
KU.03.00		Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>) Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri (<i>Blue Book</i>).
KU.03.01		Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Grey book</i>) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (<i>Grey Book</i>).
KU.03.02		Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (<i>MoU</i>), dan Dokumen Sejenisnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (<i>MoU</i>), dan dokumen sejenisnya.
KU.03.03		Dokumen Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>PHLN</i>) <i>Loan Agreement</i> Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pinjaman/hibah luar negeri (<i>PHLN</i>) <i>loan agreement</i> , legal opinion, perjanjian penerusan, pinjaman dan surat menyurat dengan pemberi pinjaman (<i>lender</i>).
KU.03.04		Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri.
KU.03.05		Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah

- Luar Negeri (PHLN)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) seperti pengembalian, prosedur pembayaran/transfer langsung, komitmen khusus/pembukaan L/C, akun khusus/dana imrest, Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri, pemberitahuan pencairan.
- KU.03.06 Otorisasi Penarikan Dana (*Payment Advice*)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Otorisasi Penarikan Dana (*Payment Advice*).
- KU.03.07 Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan realisasi pencairan dana pinjaman/hibah luar negeri.
- KU.03.08 Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor (*Replenishment*)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan penarikan dana dari negara donor seperti surat keberatan, implementasi proyek, pemberitahuan kontrak, penarikan, otorisasi, laporan pengeluaran.
Staff Appraisal Report
- KU.03.09 Naskah-naskah yang berkaitan dengan *staff appraisal report*
Report/Laporan
- KU.03.10 Naskah-naskah yang berkaitan dengan *report/laporan* seperti *progress report, monthly report, quarterly report, final report/completion report*.
Laporan Hutang Negara
- KU.03.11 Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pembayaran hutang negara dan laporan posisi hutang Negara.
- KU.03.12 Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketentuan/peraturan yang menyangkut pinjaman/hibah luar negeri.

OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- OT.00 Struktur Organisasi
- OT.00.00 Pembentukan, Perubahan, dan Penyempurnaan Organisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembentukan, perubahan hingga penyempurnaan organisasi Kementerian.
- OT.00.01 Evaluasi Organisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi kelembagaan Kementerian.
- OT.01 Analisis Jabatan
- OT.01.00 Analisis Jabatan Struktural
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan struktural

- OT.01.01 Analisis Jabatan Fungsional Tertentu
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan fungsional tertentu.
- OT.01.02 Analisis Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan pelaksana atau fungsional umum.
- OT.02 Evaluasi Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana di lingkungan Kementerian.
- OT.03 Analisis Beban Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran beban kerja jabatan serta pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja.
- OT.04 Uraian Jabatan dan Tata Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan uraian jabatan, tugas pokok, dan tata kerja di lingkungan Kementerian.
- OT.05 Tata Laksana
 - OT.05.00 Penyusunan dan Penyelarasan Tata Cara/Peta Proses Bisnis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penyelarasan tata cara/peta proses bisnis.
 - OT.05.01 Evaluasi Tata Kerja/Peta Proses Bisnis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi tata kerja/peta proses bisnis.
 - OT.05.02 Penyusunan dan Penyelarasan Sistem dan Prosedur Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penyelarasan sistem dan prosedur kerja.
 - OT.05.03 Monitoring dan Evaluasi Sistem dan Prosedur Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan system prosedur kerja.
- OT.06 Reformasi Birokrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

BJ. PENGADAAN BARANG DAN JASA

- BJ.00 Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - BJ.00.00 Penyusunan Rencana Kebutuhan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan, analisis, dan evaluasi rencana kebutuhan kantor atau Barang Milik Negara.
 - BJ.00.01 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemilihan penyedia barang/jasa.
 - BJ.00.02 Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Persediaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar harga satuan barang

- persediaan.
- BJ.01 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- BJ.01.00 Barang Bergerak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan barang bergerak seperti peralatan kantor, kendaraan, dan lain-lain mulai dari proses awal hingga Berita Acara Serah Terima.
- BJ.01.01 Barang Tidak Bergerak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan mulai dari proses awal hingga Berita Acara Serah Terima.
- BJ.01.02 Barang Habis Pakai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, dan lain-lain mulai dari proses awal hingga Berita Acara Serah Terima.
- BJ.01.03 Jasa Konsultasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultasi mulai dari proses awal hingga Berita Acara Serah Terima.
- BJ.01.04 Jasa Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan jasa lainnya mulai dari proses awal hingga Berita Acara Serah Terima.

PW. PENGAWASAN

- PW.00 Audit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit pendahuluan, audit dengan tujuan tertentu, audit BMN, audit PNPB serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.
- PW.01 Reviu
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu atas pelaksanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, manajemen risiko dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
- PW.02 Evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.
- PW.03 Penguatan Pengawasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan pengawasan sejak mulai pelaksanaan dan berakhirnya kegiatan pemantauan seperti surat tugas, permintaan data, konfirmasi/klarifikasi, notifikasi dan laporan.
- PW.03.00 Gratifikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan pengawasan tentang gratifikasi.
- PW.03.01 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

		(SPIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan pengawasan tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
PW.03.02		<i>Whistle Blowing System</i> (WBS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan pengawasan tentang <i>Whistle Blowing System</i> (WBS).
PW.03.03		Benturan Kepentingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan pengawasan tentang benturan kepentingan.
PW.03.04		Zona Integritas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan pengawasan tentang Zona Integritas.
PW.03.05		Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan pengawasan tentang Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
PW.03.06		<i>Stock Opname</i> Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan <i>Stock Opname</i> Barang Milik Negara.
PW.03.07		Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan LHKPN.
PW.03.08		Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan LHKASN.
PW.03.09		Program Pemulihan Ekonomi Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan atas suatu program Pemulihan Ekonomi Nasional di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
PW.03.10		Pengarusutamaan Gender Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
PW.03.11		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
PW.04	Konsultasi Pengawasan	
	PW.04.00	Pengadaan Barang dan Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi tentang pengadaan barang dan jasa.

	PW.04.01	Akuntabilitas Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi tentang akuntabilitas kinerja.
	PW.04.02	Akuntabilitas Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi tentang akuntabilitas keuangan.
	PW.04.03	Badan Layanan Umum (BLU) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi tentang Pengawasan BLU.
PW.05	Pemantauan	
	PW.05.00	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .
	PW.05.01	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah semesteran dan tahunan baik yang disampaikan ke Kementerian PAN dan RB, BPKP, tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan LHP lainnya.
	PW.05.02	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan /Program Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya kegiatan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
PW.06	Kegiatan Pengawasan Lainnya	
	PW.06.00	Administrasi Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pengawasan.
	PW.06.01	Perencanaan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengawasan.
	PW.06.02	Pedoman/Kebijakan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penysunan pedoman/kebijakan pengawasan.

BN. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

- BN.00 Penggunaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.
- BN.01 Pemanfaatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendayagunaan Barang Milik Negara dengan metode sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan pinjam pakai mulai dari persiapan, analisa, pengkoordinasian, perumusan, pembahasan.
- BN.02 Penyimpanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan dan penyimpanan barang persediaan dan barang inventaris kantor.
- BN.03 Pengamanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan Barang Milik Negara.
- BN.04 Distribusi/Penyaluran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan distribusi/penyaluran barang persediaan dan barang inventaris kantor.
- BN.05 Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Negara.
- BN.06 Pemindahtanganan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- BN.07 Penghapusan Barang Milik Negara.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan Barang Milik Negara sejak persiapan/pembentukan panitia, usulan, penilaian teknis, pelelangan/hibah/tukar-menukar/pemusnahan, berita acara, sampai laporan.
- BN.08 Pengawasan dan Pengendalian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.
- BN.09 Pemantauan/Pemeriksaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan/pemeriksaan Barang Milik Negara meliputi pengujian, penyusunan laporan, Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- BN.10 Inventarisasi/Pencatatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi/pencatatan Barang Milik Negara termasuk Buku Inventaris.
- BN.11 Penilaian Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian Barang Milik Negara.
- BN.12 Pelaporan Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan Barang Milik Negara.

PA. PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN

- PA.00 Usulan Perencanaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit

	kerja.
PA.01	Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
PA.01.00	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
PA.01.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
PA.01.02	Rencana Strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra).
PA.02	Rencana Kerja
PA.02.00	Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, rancangan awal rencana kerja pemerintah, rencana kerja tahunan, musrengbangnas, dan rakorbangpus.
PA.02.01	Penetapan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Menteri, Menteri dengan Kepala ANRI, Menteri dengan Menteri PAN dan RB.
PA.03	Penyusunan Rencana Anggaran
PA.03.00	Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP, Standar Biaya Khusus/SBK.
PA.03.01	Revisi Dokumen Anggaran Naskah-naskah yang berhubungan dengan revisi/perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA. PO.
PA.04	Laporan
PA.04.00	Laporan Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti laporan triwulan, laporan tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- PA.04.01 Laporan Khusus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: Pidato Presiden, Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI.
- PA.04.02 *Progress Report*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).
- PA.04.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.
- PA.04.04 Evaluasi Program
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan.
- PA.05 Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) dan RUU APBN-P
- PA.05.00 Penyusunan RAPBN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan RAPBN seperti Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas, Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Raskip)/Standar Biaya Khusus (SBK).
- PA.05.01 Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan, Risalah rapat pembahasan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan kementerian keuangan, bappenas, komisi DPR RI, Notulen Pembahasan RUU APBN oleh Pemerintah, Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN, Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan Pembahasan RUU APBN dengan Komisi VI DPR RI.
- PA.05.02 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

- Naskah-naskah yang berkaitan dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- PA.05.03 Keputusan Presiden tentang Rincian APBN Naskah-naskah yang berkaitan dengan keputusan presiden tentang Rincian APBN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya.
- PA.05.04 Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya.
- PA.05.05 Usulan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RUU APBN-P) Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Perubahan (RUU APBN-P).
- PA.05.06 Notulen Pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR Naskah-naskah yang berkaitan dengan notulen pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR.
- PA.05.07 Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P Naskah-naskah yang berkaitan dengan notulen rapat paripurna persetujuan RUU APBN-P.
- PA.05.08 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APBN-P) Naskah-naskah yang berkaitan dengan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (UU APBN-P) Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P.
- PA.05.09 Naskah-naskah yang berkaitan dengan keputusan presiden tentang rincian APBN-P

TI. TEKNOLOGI INFORMASI

- TI.00 Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi.
- TI.01 Operasional Teknologi Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan operasional teknologi informasi.
- TI.02 Pengolahan Data dan Dukungan Teknologi Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengolahan data dan dukungan teknologi informasi.

FUNGSI SUBSTANTIF

PK. PERKOPERASIAN

- PK.00 Pengembangan dan Pembaruan Koperasi
 - PK.00.00 Data dan Informasi Potensi Koperasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendataan potensi koperasi antara lain identifikasi, dan verifikasi.
 - PK.00.01 Revitalisasi Pasar Rakyat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengajuan proposal, verifikasi dan penetapan keputusan.
 - PK.00.02 Koperasi Pengelola *Factory Sharing*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi, pembinaan, pendampingan, dan monitoring.
 - PK.00.03 Korporatisasi Petani dan Nelayan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, pendataan, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi korporatisasi petani dan nelayan.
 - PK.00.04 Perluasan Jaringan Usaha Koperasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, pendataan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi.
- PK.01 Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi
 - PK.01.00 Permodalan dan Penjaminan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pendampingan pengajuan proposal, rekonsiliasi data permodalan dan penjaminan.
 - PK.01.01 Akses dan Skema Pembiayaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi akses dan skema pembiayaan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan instrumen lainnya.
 - PK.01.02 Lembaga Keuangan Non Koperasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendampingan koperasi untuk mendapatkan pembiayaan melalui lembaga keuangan koperasi Non-Bank.
 - PK.01.03 Revitalisasi dan Fasilitasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan amalgamasi/*merger* unit usaha koperasi sejenis (sub amalgamasi, pemisahan/*split off*, dan pemekaran/*spin off*).
 - PK.01.04 Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitas yang diberikan untuk pendirian koperasi melalui notaris.
- PK.02 Pengawasan Koperasi
 - PK.02.00 Rencana Pengawasan Koperasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan pengawasan koperasi secara berkala.

	PK.02.01	Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses kegiatan pelaksanaan pengawasan koperasi berkaitan dengan organisasi, usaha dan keuangan koperasi.
	PK.02.02	Evaluasi Hasil Pengawasan Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil pengawasan koperasi, seperti laporan dan berita acara hasil pengawasan koperasi.
	PK.02.03	Akuntabilitas Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemenuhan standar akuntabilitas koperasi yang transparan dan akuntabel.
	PK.02.04	Pembubaran Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pembubaran koperasi seperti surat keputusan pencabutan ijin pendirian koperasi.
PK.03	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	
	PK.03.00	Pelatihan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan kepada sumber daya manusia koperasi, pembina koperasi dan penyuluh koperasi.
	PK.03.01	Penanganan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan jabatan fungsional pengawas koperasi, meliputi penilaian angka kredit.
	PK.03.02	Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan formasi jafung pengawas koperasi.
	PK.03.03	Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan jafung melalui perpindahan.
	PK.03.04	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian jafung pengawas koperasi.
	PK.03.05	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kompetensi jafung pengawas koperasi.
UM. USAHA MIKRO		
UM.00	Pembiayaan Usaha Mikro	
	UM.00.00	Akses dan Skema Pembiayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendampingan KUR, monitoring dan evaluasi
	UM.00.01	Peningkatan Permodalan Usaha Mikro Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan daerah, penetapan penerima bantuan, monitoring dan evaluasi.
UM.01	Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro	
	UM.01.00	Perizinan Usaha

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perijinan usaha, seperti pendampingan, koordinasi dengan K/L atau OPD, dan evaluasi terkait perizinan NIB.
UM.01.01	Sertifikasi Produk	Naskah-naskah yang berkaitan dengan sertifikasi produk, seperti perencanaan, koordinasi dengan K/L atau OPD, fasilitasi dan pendampingan.
UM.01.02	Pemetaan Data Usaha Mikro	Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemetaan data usaha mikro, seperti koordinasi dengan K/L atau OPD terkait data pelaku usaha mikro.
UM.01.03	Bantuan Pemerintah	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bantuan Pemerintah kepada usaha mikro terdampak bencana, seperti koordinasi, pendataan, penetapan, monitoring dan evaluasi.
UM.02	Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro	
UM.02.00	Kemitraan	Naskah-naskah yang berkaitan dengan kemitraan, seperti Sistem/Skema, Perjanjian Kerjasama, fasilitasi, pendampingan dan monitoring.
UM.02.01	Pemasaran/ E-Commerce	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemasaran/e-commerce, seperti Sistem/Skema, Perjanjian Kerjasama, fasilitasi, pendampingan dan monitoring.
UM.02.02	Jaringan Usaha	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jaringan Usaha, seperti Sistem/Skema, Perjanjian Kerjasama, fasilitasi, pendampingan dan monitoring.
UM.02.03	Klaster/Komoditas Usaha Mikro	Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, penyusunan model usaha, Perjanjian Kerjasama, fasilitasi, pendampingan dan monitoring.
UM.03	Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro	
UM.03.00	Pelatihan	Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan fasilitasi pelaku usaha mikro, seperti koordinasi dengan K/L atau OPD, dan evaluasi/monitoring terkait pelatihan usaha mikro.
UM.03.01	Pendampingan	Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendampingan kepada SDM, seperti koordinasi dengan K/L atau OPD, dan evaluasi/monitoring terkait pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha mikro.
UM.03.02	Pengembangan Kompetensi Usaha Mikro Standar Nasional	

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Proses Pendampingan pengembangan kompetensi Usaha Mikro dalam rangka mendapatkan standar kerja nasional seperti menyusun program pelatihan, standar pelatihannya, menyusun kurikulum silabus, melatih pelaku, bekerja sama dengan stekholder lainnya.
UM.04	Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha	
UM.04.00	Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Proses kegiatan fasilitasi hukum dan Konsultasi Usaha Mikro seperti hasil bantuan hukum, hasil pendampingan hukum, hasil konsultasi usaha mikro, permohonan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), Identifikasi/seleksi masalah hukum PUMK, Koorinasi dengan LBPH-PUMK, Hasil koordinasi dituangkan dalam SK tentang pelaksanaan LBPH-PUMK, dan Laporan hasil pelaksanaan LBPH-KUKM kepada Deputi Bidang Usaha Mikro.
UM.04.01	Regulasi dan Kebijakan Bagi Usaha Mikro	Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan regulasi kebijakan bagi usaha mikro dan sosialisasi peraturan dan kebijakan usaha mikro.
UK.	USAHA KECIL MENENGAH	
UK.00	Pembiayaan dan Investasi UKM	
UK.00.00	Pembiayaan UKM	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembiayaan UKM, seperti fasilitasi dan koordinasi terkait pembiayaan bagi UKM dengan pemangku kepentingan, tenaga ahli pembiayaan UKM.
UK.00.01	Investasi UKM	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Investasi UKM, seperti fasilitasi dan koordinasi terkait investasi bagi UKM dengan pemangku kepentingan, tenaga ahli bidang kebijakan mikro dan makro ekonomi, kebijakan ekonomi dan keuangan sektoral, kebijakan permodelan ekonomi, kebijakan hukum perpajakan, kebijakan manajemen keuangan dll.
UK.01	Pengembangan SDM UKM	
UK.01.00	Peningkatan Kapasitas Pelaku UKM	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Pelaku UKM, seperti koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka pelatihan pelaku UKM.
UK.01.01	Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina UKM	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina UKM, seperti koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka pelatihan Bagi Aparatur Pembina UKM.
UK.02	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok	

- UK.02.00 Pengembangan Kawasan UKM
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan Kawasan UKM, seperti fasilitasi pengembangan sentra UKM melalui *factory sharing* dan tenaga ahli *branding*.
- UK.02.01 Pengembangan Rantai Pasok UKM
Naskah-naskah yang berkaitan program Pengembangan Rantai Pasok UKM, seperti fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UKM, peningkatan system manajemen dan mutu produk *start-up*, pengembangan sistem logistic produk UKM, dan tenaga ahli standarisasi.
- UK.03 Kemitraan Perluasan Pasar UKM
 - UK.03.00 Kemitraan UKM
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kemitraan UKM, seperti pendataan UKM ke dalam aplikasi Smesta, data fasilitasi UKM dalam bentuk *on-boarding* di *market place* dan katalog *digital*, data pengembangan peta potensi pasar luar negeri, *MoU* dengan pemangku kepentingan.
 - UK.03.01 Perluasan Pasar UKM
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perluasan Pasar UKM, seperti koordinasi dan fasilitasi perluasan akses pasar UKM melalui kegiatan promosi (pameran dagang) dalam negeri dan luar negeri, serta partisipasi pada expo internasional.

WU. KEWIRAUSAHAAN

- WU.00 Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
 - WU.00.00 Konsultasi Bisnis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas wirausaha melalui konsultasi bisnis, meliputi pengembangan, pendampingan, dan pelatihan kewirausahaan, Sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya.
 - WU.00.01 Pendampingan Usaha
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendampingan usaha bagi wirausaha, meliputi pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, identifikasi wirausaha, penyusunan pedoman pendampingan wirausaha, Sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya.
 - WU.00.02 Pemasyarakatan Kewirausahaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemasyarakatan kewirausahaan, meliputi pemasyarakatan pendampingan usaha dan konsultasi bisnis, dan penumbuhan kewirausahaan.
- WU.01 Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
 - WU.01.00 Pengembangan Teknologi Informasi Usaha
Naskah-naskah yang berkaitan dengan

		kegiatan penyelenggaraan Pengembangan Teknologi Informasi Usaha, meliputi pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sistem informasi kewirausahaan, digitalisasi KUMKM, Sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya.
	WU.01.01	Pengembangan Inkubasi Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi Usaha, meliputi pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, pengembangan lembaga inkubator dan lembaga pendidikan dan pelatihan, digitalisasi KUMKM, Sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya.
	WU.01.02	Pemasyarakatan Inkubasi Kewirausahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemasyarakatan inkubasi kewirausahaan.
WU.02	Pengembangan Ekosistem Bisnis	
	WU.02.00	Peningkatan Peran Dunia Usaha, Industri dan Pendidikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Peningkatan Peran Dunia Usaha, Industri dan Pendidikan, meliputi pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sinkronisasi regulasi/peraturan/kebijakan, sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya.
	WU.02.01	Peningkatan Peran Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Peningkatan Peran pemerintah, meliputi pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan serta pengembangan kapasitas SDM, pengelolaan dan pemberdayaan PLUT KUMKM, sistem pemantauan dan pelaporan, sinkronisasi regulasi/peraturan/kebijakan, sinergi kemitraan, dan tenaga pendukung lainnya.
WU.03	Pembiayaan Wirausaha	
	WU.03.00	Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan dan perluasan akses pembiayaan wirausaha, meliputi bantuan pemerintah, peningkatan akses pembiayaan dan kapasitas wirausaha, pembiayaan alternatif, literasi keuangan, digitalisasi keuangan dan tenaga pendukung lainnya.
	WU.03.01	Permodalan Wirausaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permodalan wirausaha, meliputi bantuan pemerintah, peningkatan akses permodalan dan kapasitas wirausaha, pembiayaan alternatif, literasi keuangan, digitalisasi keuangan dan tenaga pendukung

- lainnya.
- WU.04 Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha
- WU.04.00 Pemetaan Data
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemetaan dan pendataan UMKM, meliputi pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, Pemetaan dan pendataan KUMKM, dan tenaga pendukung lainnya.
- WU.04.01 Analisis dan Pengkajian Usaha
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Analisis dan Pengkajian Usaha, meliputi Pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan analisis dan pengkajian usaha, dan tenaga pendukung lainnya.
- WU.04.02 Data Makro Ekonomi Bidang KUMKM
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan data makro ekonomi KUMKM, meliputi data makro ekonomi KUMKM, pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, dan tenaga pendukung lainnya.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI